

**KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN BONE DALAM
MEMPERTAHANKAN KOMUNITAS BISSU**

***THE BONE REGENCY GOVERNMENT'S COMMITMENT IN
SUSTAINING THE BISSU COMMUNITY***



Oleh:

SYAHRUL MAULANA

E052192004



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2024

TESIS
Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam
Mempertahankan Komunitas Bissu

Disusun dan diajukan oleh :

Syahrul Maulana

E052192004



Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2024

**Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam
Mempertahankan Komunitas Bissu**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Politik

Disusun dan diajukan oleh :

Syahrul Maulana

E052192004



Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS**KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN BONE DALAM
MEMPERTAHANKAN KOMUNITAS BISSU**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**Syahrul Maulana
E052192004**telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 4 Juni
2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


pada

Program Pascasarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

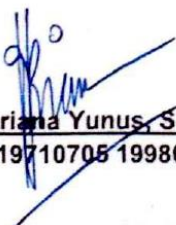
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1008**Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D**
NIP. 19621231 199003 1 023

Ketua Program Studi


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP. 19710705 199803 2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1008

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mempertahankan Komunitas Bissu" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si dan Drs. A. Yakub, M.Si.,Ph.D). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah terpublikasikan di Jurnal Hicospos sebagai artikel dengan judul "The Role of Bissu Community in Political Constellation in Bone District". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 04 Juni 2024



Syahrul Maulana

NIM : E052192004

UCAPAN TERIMA KASIH



Syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT, dengan limpahan rahmat dan inayah-Nya sehingga Tesis dengan judul “Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mempertahankan Komunitas Bissu”, dapat penulis selesaikan dan *Insyallah* bermanfaat. Salam dan shalawat penulis haturkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai satu-satunya panutan dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyelesaian tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini memerlukan proses dan pengorbanan yang tidaklah sedikit. Berbagai macam hambatan dan kendala penulis bisa rasakan, tapi semua itu dapat dilalui berkat do’a dan dorongan motivasi dari kedua orang tua penulis Ibunda Lily Suriani dan Ayahanda Syahril Harisa, serta saudara penulis Salim Mubarak dan Lisa Adiba Febrianti.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Phil.Sukri, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil.Sukri, S.IP., M.Si selaku dosen penasihat I dan Bapak Drs. A. Yakub, M.Si.,Ph.D selaku dosen penasihat II. Beliau merupakan dosen-dosen pembimbing luar biasa dan inspiratif. Beliau telah banyak memberikan arahan, bimbingan, tantangan, dan motivasi hingga tersusunnya tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si, dan Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP.,M.Si., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan Staf FISIP Unhas yang memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, nasihat dan pelayanannya selama penulis dalam proses perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin angkatan 2019.
6. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga segala bantuan yang diberikan bernilai ibadah dan mendapatkan ridho Allah SWT sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya.

Makassar, 04 Juni 2024

SYAHRUL MAULANA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kerangka Teori.....	9
2.1.1. Teori Komitmen.....	9
2.1.2. Teori Pertukaran Sosial	14
2.1.3. Konsep Budaya Politik	15
2.2. Kerangka Konseptual	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Tempat dan Waktu	19

3.2.1. Metode Pengumpulan Data	27
3.2.2. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1.1. Awal Sejarah Bissu dan Sistem Kepercayaan, dan Kondisi saat ini.....	31
4.1.2 Komitmen Pemerintah Terhadap Komunitas Bissu	43
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI	67

ABSTRAK

Syahrul Maulana, **Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Dalam Mempertahankan Komunitas Bissu** (dibimbing oleh Sukri dan Andi Yakub).

Latar Belakang. Tahun 1950 hingga 1960an komunitas Bissu diburu karena dianggap menyimpang dari agama Islam. Ditahun 1993 Andi Muhammad Amir selaku bupati saat itu mencoba memunculkan kembali Komunitas *Bissu* yang kemudian dimasa pemerintahan bupati terpilih DR. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si periode 2013-2023 selama dua periode mengangkat komunitas ini sebagai mitra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dengan Komunitas *Bissu* pada masa pemerintahan bupati terpilih DR. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si periode 2013-2023. **Metode.** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *filed research* yang meliputi observasi, wawancara dan dokumenter. Data dianalisis melalui deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu, Teori Komitmen, Teori Pertukaran Sosial dan Konsep Budaya Politik. **Hasil** penelitian menjelaskan bahwa komunitas *Bissu* yang ada di Kabupaten Bone bisa bertahan sejauh ini karena tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang menganggap *Bissu* sebagai pelaku dan peninggalan sejarah yang wajib dilestarikan dan juga sebagai bukti kekayaan budaya di Kabupaten Bone, dengan kesadaran itu pemerintah setempat menjadikan komunitas *Bissu* sebagai mitra dalam urusan pariwisata dan kebudayaan. **Kesimpulan.** *Bissu* dibantu oleh pemerintah dengan memberikannya kesempatan lewat komitmen berusaha menemukan kembali jati dirinya sehingga komunitas ini mampu diterima kembali di masyarakat umum.

Kata Kunci : Komunitas *Bissu*; warisan budaya; komitmen pemerintah

ABSTRACT

Syahrul Maulana, **The Bone Regency Government's Commitment in Sustaining the Bissu Community** (supervised by Sukri Tama and Andi Yakub).

Background. In the 1950s to 1960s the Bissu community was hunted down because it was considered deviating from Islam. In 1993 Andi Muhammad Amir as the regent at that time tried to bring back the Bissu Community which then during the reign of the elected regent DR. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si for the 2013-2023 period for two periods appointed this community as a partner of the Culture and Tourism Office. **Objective.** This study aims to determine and analyze the commitment of the Bone Regency Government to the Bissu Community during the reign of the elected regent DR. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si 2013-2023 period. **Methods.** This research uses a qualitative research method with a descriptive type. Data collection techniques in this study used filed research which includes observation, interviews and documentaries. Data were analyzed through descriptive analysis. This research uses three theories, namely, Commitment Theory, Social Exchange Theory and the Concept of Political Culture. The **results** of the study explain that the Bissu community in Bone Regency can survive so far because it cannot be separated from government intervention which considers Bissu as actors and historical relics that must be preserved and also as evidence of cultural wealth in Bone Regency, with that awareness the local government makes the Bissu community a partner in tourism and cultural affairs. **Conclusion.** Bissu are assisted by the government by giving them the opportunity through commitment to try to rediscover their identity so that this community can be accepted again in the general public.

Keywords: Bissu community; cultural heritage; government commitment



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Sebagai provinsi yang besar, tak heran ketika provinsi ini memiliki banyak cerita/peninggalan sejarah terdahulu. Salah satu peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih dapat dilihat adalah Bissu. Bissu yang dulunya adalah penyambung lidah antara raja dan rakyat serta memiliki peranan yang cukup besar dalam sistem tiap-tiap kerajaan di Sulawesi Selatan.

Orang Bugis adalah salah satu dari berbagai suku bangsa di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari empat juta orang. Mereka mendiami bagian barat daya Pulau Sulawesi. Mereka termasuk ke dalam rumpun keluarga besar Austronesia (Pelras, 2006 : 1).

Dr. Gilbert Albert Hamonic ahli naskah Bugis Kuno dari Perancis, dalam buku "La Galigo, Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia", menyimpulkan bahwa Bissu adalah komunitas kecil dalam masyarakat Bugis tapi posisinya cukup penting untuk jadi patokan dalam suatu wilayah yang cukup luas. Ia menyebut tradisi Bissu sebagai tradisi agama dalam masyarakat Bugis kuno (Makkulau, 2008 : x)

Kitab I Lagaligo yang telah menjadi acuan utama orang Bugis masa lampau, mengisahkan tentang Bissu Lae Lae dan Bissu Lantimojong sebagai Bissu pertama di Luwu. Mereka dipercaya sebagai Bissu

Manurung, atau Bissu yang diturunkan dari langit bersama Batara Guru. Dari Luwu inilah tradisi Bissu berasal, yang kemudian berkembang ke berbagai pusat budaya Bugis lainnya seperti Bone, Soppeng, Barru, Bulo-Bulo, Suppa dan sebagainya. Kini, tidak semua wilayah Bugis tersebut masih dapat dijumpai Komunitas Bissu apalagi yang masih melakukan ritual lama mereka (Lathief, 2009 : 21).

Menurut Gilbert A Hamonic, agama Bissu itu mula-mula lahir dari upacara dan kepercayaan rakyat yang sangat kuno. Dalam perjalanan masa, kepercayaan orang biasa itu itu diubah oleh beberapa pengaruh tradisi lainnya (termasuk tradisi Hindu dan Budha) lalu diterima oleh kalangan bangsawan. Perkembangannya kemudian, agama itu dikembalikan lagi ke masyarakat tempat ia lahir, tetapi telah mengalami perubahan dan seolah-olah merupakan agama eksklusif para bangsawan masa itu (Makkulau, 2008 : 18).

Runtuhnya Kerajaan Bone di tanah Sulawesi pada masa pemerintahan La Pawawoi Karaeng Sigeri (1895 – 1905 M), berakibat buruk bagi kehidupan kaum Bissu. Kehidupan mereka didalam istana kerajaan terpaksa ditinggalkan dan kembali hidup berbaur di tengah masyarakat. Dalam kehidupan kesehariannya, para Bissu ini seolah menarik diri. Bahkan mereka cenderung menyembunyikan identitasnya sebagai Bissu. Hal ini kemudian memuncak setelah agama islam mulai masuk dan dianut orang Bugis (Trianto, 2003).

Tahun 1950-an hingga tahun 1965-an, meletus pemberontakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) yang berusaha keras menghapuskan dan melarang semua yang mereka anggap *musyrik* bagi umat Islam. Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK) Kahar Muzakkar menganggap kegiatan para Bissu adalah penyembah berhala, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membangkitkan *feodalisme*. Karena itu kegiatan, alat-alat upacara, dan para pelakunya diberantas. Ribuan perlengkapan upacara dibakar atau ditenggelamkan ke laut. Magangka Puang Matowa Bissu Bone misalnya, dipancung kepalanya kemudian diarak keliling kota sebagai perang urat saraf kepada pengikutnya. Banyak Bissu dan *sanro* (dukun) digunduli atau dipaksa menjadi pria yang harus bekerja keras (Lathief, 2009 : 24).

Kebijakan pemerintah pada saat itu yang melegalkan tragedi-tragedi yang sampai sekarang masih membekas dihati para Bissu memang sangat disayangkan. Bissu bisa bertahan hingga saat ini karena punya fungsi sosial yang terekam dalam masyarakat. Sejak zaman Bugis kuno hingga sekarang ini masih ada sebagian masyarakat Bugis yang percaya Bissu dapat menghubungkannya dengan leluhur dan mengambulkan segala hasrat atau permohonannya. Akan tetapi tidak ada lagi perhatian dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka.

Menilik kembali kejadian dimasa lampau tentunya ada beberapa hal yang menjadikannya menarik untuk diteliti dimana Bissu yang dulunya dianggap penting di zaman kerajaan, kemudian dibumi-hanguskan oleh

pemerintah kala itu, dan kini para Bissu muncul kepermukaan menunjukkan eksistensinya. Hal ini tentunya tidak lepas dari usaha pemerintah daerah Kabupaten Bone berupaya mempertahankan eksistensi Bissu mengingat bahwa Bissu itu adalah budaya itu sendiri.

Perayaan Hari Jadi Bone ditahun 2022 ternyata tidak melibatkan komunitas Bissu membuat banyak opini dan asumsi yang beragam di media massa sehingga Pemerintah Kabupaten Bone harus kemudian memberikan klarifikasi ketidakikutsertaan Komunitas Bissu. Opini yang beragam mulai dari media massa hingga ke masyarakat seolah memberikan isyarat tidak adanya dukungan pemerintah setempat terkait keberadaan Bissu yang notabene sebagai penyelenggara kegiatan hari jadi Kabupaten Bone. Para civitas akademik dan juga pemerhati budaya kemudian bersama-sama memberikan ruang dan memfasilitasi Bissu dengan dialog publik untuk menyuarakan eksistensi mereka yang kemudian menjadi alasan adanya jarak antara Komunitas Bissu dan juga Pemerintah Kabupaten Bone.

Adanya kejadian tersebut menurut penulis perlu kajian lebih dalam terhadap kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Komunitas Bissu, sehingga pada akhirnya penulis akan mengidentifikasi bentuk kerja sama kedua belah pihak dengan judul **"Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam mempertahankan Komunitas Bissu"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang ketidakterlibatan Bissu selaku pelaku serta aset budaya di Kabupaten Bone pada Hari Jadi Kabupaten, tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk kebijakan yang ada di Kabupaten Bone terkait budaya, maka dari itu muncul pertanyaan Bagaimana komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mempertahankan Komunitas Bissu?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Bone dalam mempertahankan Komunitas Bissu.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut:

2.1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan kajian dalam ilmu politik serta memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori keilmuan khususnya pada kajian ilmu politik.

2.2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami seperti apa dan bagaimana itu Bissu dalam kacamata pemerintah, dan hasil penelitian ini dapat pula dijadikan petunjuk dan sebagai bahan acuan bagi aktivitas ilmiah terutama dalam rangka penelitian lebih lanjut.

1.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya H.Hary Sumange yang berjudul “Menelusuri Keberadaan Bissu (*Calabai*) Di Kabupaten Soppeng”. Jurnal ini membahas tentang kerajaan Soppeng melalui B.F.Matthes yang menekuni naskah – naskah Kuno Bugis . Memiliki hubungan yang erat dengan Arung Pancana Toa dalam mengumpulkan naskah La Galigo dengan judul “La Galigo Colli Puji’e”. BF.Matthes menulis buku BOEGINISH CRISTOMASI. Dari kedekatan ini BF .Mathhes sebagai barisan terdepan belanda Bebas memasuki istana kerajaan Bugis, mengadakan pendekatan dengan pemangku adat dan raja-raja Bugis termasuk Raja Soppeng (Sumange : 2014). Penelitian ini memiliki banyak kesamaan yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian ini

sama-sama menggali keberadaan Komunitas Bissu dengan menggunakan pendekatan sejarah, sama yang yang dilakukan oleh penulis. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya membahas tentang keberadaan Bissu di Kabupaten Soppeng, lebih memfokuskan pada kehidupan Bissu di masyarakat, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas komitmen yang terjalin antara Komunitas Bissu dan pemerintah Kabupaten Bone.

2. Penelitian oleh Muh. Said bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia yang berjudul "Peran Bissu Pada Masyarakat Bugis". Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang peran Bissu pada masa kerajaan (sebelum Islam dan setelah Islam) di Sulawesi Selatan, untuk mengetahui tentang kehidupan ritual Bissu setelah masa kemerdekaan. Penelitian ini bersifat analisis historis dengan menggunakan metode sejarah, yakni heuristik dengan cara mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, kritik yakni bertujuan untuk pengujian terhadap sumber-sumber, interpretasi yaitu penentuan kedudukan yang berdasarkan pada penganalisisan pada sumber, serta historiografi yakni pengungkapan sejarah secara tertulis (Said, 2016 : 69). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang peranan Komunitas Bissu dalam masyarakat baik sebelum masuknya agama

Islam dan juga setelah masuknya agama Islam di masyarakat khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada peran komunitas ini yang ada setelah relasi terbangun antara Komunitas Bissu dengan Pemerintahan di Kabupaten Bone setelah masa kemerdekaan hingga sekarang ini.

3. Laporan Penelitian karya R.R. Nur Suwarningdyah. Penelitian Pelestarian Tinggalan Budaya : “Kesenian” ini difokuskan pada dua jenis kesenian tradisional yang hampir punah, yaitu: kesenian *kothek lesung* di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dan kesenian pada komunitas Bissu di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan (Suwarningdyah, 2007). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni sama-sama membahas adanya krisis kebudayaan mengenai Bissu serta ingin melihat seperti apa perjuangan Komunitas Bissu dimasa sekarang sehingga tidak mengalami kepunahan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana cara yang dilakukan pemerintah terhadap budaya-budaya yang ada di masyarakat yang mengalami krisis kepunahan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memfokuskan pada kerjasama serta relasi Komunitas Bissu dengan pemerintahan yang ada di Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan teori, yaitu teori komitmen, teori Pertukaran sosial dan teori politik budaya.

2.1.1. Teori Komitmen

Steers dan Poster memandang komitmen sebagai suatu sikap. Menurut mereka orang yang memiliki komitmen adalah orang yang bersedia melibatkan diri terhadap organisasinya. Orang tersebut mau menyumbangkan segala sesuatu yang ada pada dirinya demi untuk kepentingan organisasi, dengan maksud agar organisasi tersebut tetap dalam keadaan baik (Muslim, : 2013 : 81). Komitmen merupakan suatu keyakinan antara pihak terkait yang menginginkan adanya hubungan yang terus menerus, dan dinilai penting dalam rangka menjaga hubungan tersebut.

Komitmen adalah keterikatan pada tujuan yang akan dicapai sehingga rela untuk berkorban waktu, tenaga, materi dan kemampuan untuk mendapatkannya. Komitmen dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang mengatur sendiri (*self generating*). Komitmen adalah suatu keadaan yang tidak dapat dipaksa dan suatu kondisi yang harus dikembangkan melalui perasaan keterlibatan. Mowday, Porter, dan Steers komitmen memiliki dua indikator yaitu sikap dan kehendak untuk bertindak laku. Sikap berkaitan dengan identifikasi, keterlibatan dan kesetiaan, sedangkan kehendak

bergantung pada keadaan untuk bertingkah laku dalam kesediaan menampilkan usaha (Muhtarom, : 2015 : 133).

Konsep komitmen organisasi telah menjadi isu penelitian di banyak negara dalam 60 tahun terakhir. Konsep ini diperkenalkan oleh Whyte pada kisaran tahun 1956. Berakar dari paradigma teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory/SET*) dalam memahami perilaku organisasi, penelahaan teori tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1920-an (Cropanzano dan Mitchel, 2005). Teori tersebut meyakini bahwa pertukaran sosial merupakan interaksi yang berkelanjutan yang menciptakan kewajiban (Emerson, 1976) dan saling ketergantungan antar pihak yang berinteraksi (Blau, 1964). Oleh karenanya pendekatan pemahaman terhadap akar permasalahan dalam teori pertukaran sosial (*SET*) ditentukan oleh penelahaan multi disiplin. Antara lain disiplin sosiologi, antropologi, and psikologi sosial. Sehingga dampak dari pertukaran sosial ini antara lain adalah kekuatan hubungan relasional yang berkualitas (Cropanzano dan Mitchel, 2005). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengaruh dari teori tersebut, maka memunculkan berbagai teori terkait, diantaranya teori pertukaran relasional (*the exchange relationship theory*) Mardiana, 2017 : 11).

Teori pertukaran relasional memandang terjadi pertukaran relasional dan kepentingan antara organisasi sebagai suatu sistem dan para anggota organisasi, dalam hal ini karyawan. Teori ini dikemukakan oleh March dan Simon pada tahun 1958 (Angle dan Perry, 1981).

Pada awalnya, konsep komitmen organisasi berfokus pada konsep komitmen itu sendiri, didasarkan pada pendekatan sikap, yang menunjuk pada permasalahan dan loyalitas (Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974). Menurut (Porter et al., 1974) pendekatan sikap mengacu pada keterikatan psikologis atau komitmen afektif yang dibentuk oleh seorang karyawan dalam hubungannya dengan permasalahan dan loyalitasnya dengan organisasi. Pasangan fenomenal yang menjadi ikon komitmen, yakni Steers dan Porter (1983) menjelaskan bahwa komitmen organisasi sebagai "loyalitas terhadap organisasi". Ditandai dengan niat untuk tetap berada di dalamnya; melakukan identifikasi dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Tak kalah pentingnya adalah kemauan untuk menggunakan tenaga ekstra atas nama organisasi. Individu mempertimbangkan sejauh mana nilai-nilai dan tujuan mereka berhubungan dengan organisasi sebagai bagian dari komitmen organisasi, oleh karena itu dianggap sebagai hubungan diantara setiap karyawan dan organisasi.

Untuk mempertegas eksistensi anggota dalam suatu organisasi. Stoner, Freeman dan Gilbert (1995:6) memberikan definisi organisasi sebagai pola kerjasama antara dua orang atau lebih yang terikat dengan suatu cara yang terstruktur untuk mencapai satu atau seperangkat tujuan tertentu. Tujuan merupakan unsur fundamental dalam organisasi, sehingga tanpa adanya tujuan, maka tidak beralasan suatu organisasi itu ada. Tujuan tersebut merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh organisasi, termasuk oleh anggota-anggotanya.

Luthans (2006:131) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan bentuk kontribusi psikologis karyawan atau anggota kepada organisasi. Komitmen organisasi memiliki tiga komponen yaitu: komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Luthans mengemukakan tiga model komitmen organisasi, yaitu: *affective*, *continuance*, dan *normative*. *Affective commitment* meliputi emosional karyawan untuk mengidentifikasikan dirinya dan terlibat dalam organisasi. *Continuance commitment* merupakan komitmen yang didasarkan atas biaya-biaya yang menyebabkan karyawan tetap betah tinggal dalam organisasi. *Normative commitment* didasarkan pada norma yang melibatkan karyawan merasa berkewajiban untuk menyatu dengan organisasinya.

Hersey dan Blanchard (1996:421-425) mengemukakan lima jenis komitmen organisasi, yaitu komitmen-komitmen terhadap pelanggan, organisasi, diri sendiri, orang, dan tugas. Masing-masing jenis komitmen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komitmen terhadap pelanggan, para manajer bekerja keras untuk menyediakan layanan yang bermanfaat bagi pelanggan. Pelanggan didefinisikan sebagai orang yang menguntungkan unit kerja. Dua cara utama manajer mendemonstrasikan komitmen yang kuat kepada pelanggan adalah melayani pelanggan dan membangun arti penting pelanggan.

2. Komitmen terhadap organisasi. Manajer secara positif mendemonstrasikan komitmen dalam tiga cara, membangun organisasi (membangun dukungan untuk organisasi dan secara efektif mencegah komentar yang bersifat merusak), mendukung manajemen tingkat tinggi (memperkuat kemampuan organisasi untuk menerapkan keputusan dan mencapai sasaran hasil), dan mengoperasikan nilai-nilai dasar organisatoris.
3. Komitmen terhadap diri. Komitmen terhadap diri sendiri dibuktikan dengan tiga aktivitas khusus, bertingkahtaku secara otonomi, membangun diri sebagai manajer, dan menerima kritik yang bersifat membangun.
4. Komitmen terhadap orang. Fokusnya adalah kepada tim kerja dan anggota kelompok individual. Manajer menghabiskan waktu dan energi bekerja dengan para bawahan. Secara khusus, tiga aktivitas penting komitmen ini; mempertunjukkan pengenalan dan perhatian positif (membuat orang-orang merasakan dan bertindak seperti pemenang), memberi umpan balik yang membangun (mengambil waktu untuk memandu dan melatih individual untuk meningkatkan performansi), dan melibatkan gagasan yang inovatif (mendemonstrasikan minat orang lain dan menstimulasikan kemajuan individu dan kelompok).
5. Komitmen terhadap tugas. Berkonsentrasi terhadap tugas yang perlu dilaksanakan. Komitmen ini dilakukan dengan pemeliharaan fokus

yang benar, tindakan yang berorientasi, dan membangun arti penting tugas (Mardiana, 2017 : 14).

Komitmen pada organisasi yang merupakan point kedua dari jenis komitmen menjadi landasan acuan terhadap penelitian ini dimana Pemerintah Kabupaten Bone menjadi objek kajian terkait upaya yang dilakukan dalam mempertahankan eksistensi komunitas Bissu dan pemberian ruang terhadap komunitas Bissu dalam masyarakat.

2.1.2. Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dorongan utama dalam hubungan interpersonal adalah kepuasan dari kepentingan pribadi dua orang yang terlibat. Definisi kepuasan relasi berdasarkan perspektif teori pertukaran sosial adalah keadaan dimana seseorang menerima kembalian yang sesuai dengan pengeluaran mereka (West & Turner, 2008:217). Artinya adalah keadaan dimana pemerintah Kabupaten Bone kepada Bissu mendapatkan *reward* yang sesuai dengan harapan mereka ketika mereka telah melakukan banyak pengorbanan (*cost*), dalam hal ini adalah dalam dunia pekerjaan yang dimaksud adalah berupa menjadi bagian dari *Event organizer* pada beberapa acara besar yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat.

Social Exchange Theory merupakan suatu teori yang menilai kepuasan dari kepentingan dua orang atau lembaga yang terlibat. Evaluasi dari bentuk hubungan ini adalah ketika orang atau lembaga menghitung nilai hubungan mereka dan membuat keputusan apakah akan tetap tinggal

dalam hubungan itu atau pergi. Teoritikus Thiabaut dan Kelley yang mencetuskan teori interdependensi di dalam buku Pengantar Teori Komunikasi, memberikan penjelasan mengenai bagaimana seseorang mengevaluasi hubungan mereka sehubungan dengan apakah mereka akan tetap tinggal di dalam hubungan atau meninggalkannya. Thibaut dan Kelley mengklaim bahwa evaluasi ini didasarkan pada dual tipe perbandingan, salah satunya adalah level perbandingan. Level perbandingan adalah standar yang mewakili perasaan seorang mengenai apa yang mereka harus terima dalam hal penghargaan dan pengorbanan dari sebuah hubungan. Jadi, perasaan yang subjektif mengenai apa yang harus ia berikan dan dapatkan sebagai balasannya (West & Turner, 2008: 221).

2.1.3. Konsep Budaya Politik

Istilah "*culture*" yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin "*corele*" yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu "*colere*" kemudian "*culture*" diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. E.B Tylor dalam Soekanto memberikan definisi isi mengenai kebudayaan ialah: "kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat" (Maksudi, 2017 : 65).

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan merupakan tujuan pribadi seseorang (private goals). Konsep-konsep pokok yang dikandung dalam pengertian politik adalah: Negara (state), kekuasaan (power), pengambilan Keputusan (decision making), kebijakan (policy), serta pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) (Miriam Budiardjo, 2008 : 9).

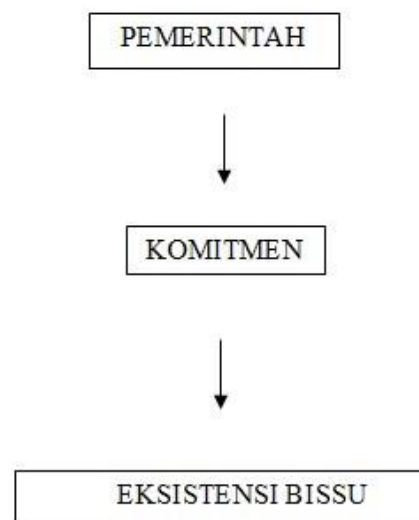
Menurut Almond dan Verba (dalam Andi Yakub, 2019), menggunakan teori budaya politik sebagai jembatan untuk menghubungkan antara sikap, persepsi dan motivasi individu- individu yang memainkan peranan dalam sistem politik dengan karakter dan penampilan sistem politik atau untuk menghubungkan sikap politik dengan struktur politik. Asumsi teori ini adalah bahwa sebagaimana sikap seseorang mempengaruhi apa yang akan dilakukan, demikian juga pengaruh budaya politik suatu bangsa terhadap tingkah laku warga masyarakat dan pemimpinnya dalam sistem politik.

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Menurut Samuel H. Beer dan Adam B. Ulam serta Gilbert Abcarian dan George S. Masannat, umumnya dianggap dalam sistem politik terdapat empat variabel, yaitu: (1) kekuasaan-sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat;

(2) kepentingan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik; (3) kebijakan–hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan; serta (4) budaya politik–orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik (Miriam Budiardjo, 2008 : 49).

2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Kerangka pikir ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk komitmen yang terbangun oleh pemerintah kabupaten Bone dengan komunitas Bissu. Pemerintah Kabupaten Bone melalui kebijakan yang ada menjalin kerjasama atau komitmen yang dapat menguntungkan dari kedua belah pihak yakni pemerintah setempat dan juga Komunitas Bissu.



Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, serta Dewan Adat Saoraja yang diketuai oleh Andi Baso Hamid Ahmad membuat komitmen dengan Komunitas Bissu guna mempertegas bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mempertahankan eksistensi Bissu. Dalam menjaga komitmen tersebut, ketua Bissu juga dilibatkan dalam struktur organisasi dewan adat Saoraja sehingga apa yang menjadi kerja sama diantara keduanya bisa meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam berargumentasi terkait komitmen yang ada diantara keduanya.

Kerangka Konseptual ini kemudian diharapkan mampu dijadikan alur pemikiran untuk menganalisa sejauh mana pemerintah Kabupaten Bone dalam menjalin komitmen dengan komunitas Bissu saat ini.